

ASEAN Minus Myanmar

DALAM Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo bulan lalu, kursi Myanmar kosong. Ketidakhadiran negara anggota ASEAN dalam KTT merupakan hal baru. Peristiwa itu tergolong tidak normal, apalagi ketidakhadiran itu terjadi secara berturut-turut sejak KTT ke-38 hingga ke-42.

Dalam pertemuan puncak organisasi regional, ketiadaan wakil pejabat tinggi negara anggota sering ditafsirkan sebagai tanda adanya persoalan besar. Ketidakhadiran Myanmar dalam sejumlah KTT ASEAN pun demikian. Pemimpin Myanmar sengaja tidak diundang karena belum menunjukkan langkah nyata untuk memenuhi kesepakatan.

Awal tahun 2021 militer Myanmar mengambil alih pemerintahan secara paksa. Para pemimpin hasil pemilu ditangkap dan dipenjarakan. Para demonstran dibubarkan paksa menggunakan kekerasan hingga timbul banyak korban jiwa. Banyak warga Myanmar, khususnya etnis Rohingya mengungsi ke beberapa

negara tetangga. Mereka tidak kuat mendapat perlakuan buruk dari rezim militer.

ASEAN berupaya membantu mengatasi masalah tersebut. ASEAN siap membantu menangani pengungsi dan memediasi untuk penyelesaian konflik. ASEAN juga siap membantu dalam penegakan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan HAM.

Dalam pembicaraan antara ASEAN dengan junta militer Myanmar disepakati lima konsensus yang meliputi: penghentian kekerasan dan semua pihak menahan diri; dialog konstruktif untuk menemukan solusi damai; ASEAN memfasilitasi mediasi dan dialog; ASEAN memberi bantuan kemanusiaan; dan utusan khusus ASEAN akan mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa.

Sampai saat ini belum ada kemajuan dalam pelaksanaan lima poin

konsensus itu. Sedang ASEAN mendapat tekanan banyak pihak untuk tidak membiarkan kesewenang-wenangan di Myanmar terus berlanjut. Banyak pihak menuntut ASEAN mengambil langkah tegas, bukan terpaku pada prinsip non-intervensi.

Itulah sebabnya ASEAN tidak mengundang pemimpin politik Myanmar dalam KTT dan pertemuan menteri luar negeri. Ada kemungkinan pemimpin politik Myanmar juga tidak diundang dalam pertemuan-pertemuan lain jika belum ada kemajuan realisasi lima konsensus itu.

Sebagian pengamat menuntut ASEAN bersikap lebih tegas. Tetapi bagi ASEAN, langkah itu sudah terlalu jauh. Selain memegang teguh prinsip non-intervensi, ASEAN juga menjalankan prinsip konsensus. Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah-mufakat. Keputusan untuk 'mengeliminasi'

Myanmar tentu bukan hasil konsensus.

Keputusan 'mengeliminasi' Myanmar menyiratkan terjadinya pergeseran pola pengambilan keputusan, dari musyawarah-mufakat menjadi berdasar suara terbanyak. Artinya ada prinsip yang mulai tidak dipatuhi.

Memang cara konsensus juga punya kelemahan. Tahun 2012 KTT ASEAN di Kamboja gagal mencapai kesepakatan tentang isi *joint communique*, karena Kamboja tidak setuju terhadap klausul yang bisa merugikan China di Laut China Selatan. Rupanya Kamboja lebih mendukung kepentingan China ketimbang kepentingan ASEAN.

Dua kasus itu sama-sama melemahkan ASEAN. Jika ASEAN tidak patuh pada prinsip yang menjadi fondasi atas eksistensinya, jangnan-jangan ke depan pencapaiannya dalam hal stabilitas keamanan regional juga akan tergerus. **□**

**) Dr Saptopo B Ilkodar,
Dosen Jurusan HI UPN Veteran
Yogyakarta.*

